



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ELPINA**
2. Jabatan : **PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN**
3. NHK : **420798**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/150 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 234 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 289 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 90.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS/AVANZA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOUL GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 35.750.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 273.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.198.750.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.198.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.